



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ROJIKIN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. PALMERAH
3. NHK : 229082

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.283.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m<sup>2</sup>/293 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 586.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/110 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 115 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 287.500.000
5. Tanah Seluas 120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 23.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA (GL.100) SEPEDA MOTOR Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.050.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.763.933
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.170.000.000
Sub Total	Rp.	3.520.813.933
III. HUTANG	Rp.	1.976.258.679
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.544.555.254</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.